

**RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Visi/Goal : Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
 Sasaran Pokok : Penurunan tingkat kemiskinan
 Indikator : Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
 Target : 8-10% pada akhir 2014

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
	Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan	Outcomes: Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar dan kualitas kebijakan PK (<i>affirmative policy</i>)						
I.	Fokus Prioritas: Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga							
1.	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenkes	842,40
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8.481	9.000	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kemenkes	6.447,20
3.	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS	Persentase RS yang melayani pasien miskin peserta program Jamkesmas	75	95	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kemenkes	24.782,70
4.	Pengembangan Kebijakan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesetaraan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta	1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta (juta)	3,75	19,28 ^{KJ}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	4.378,15

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	11,9	62,5 ^{K)}			
5.	Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Pra-S dan KS-1 ¹⁾	Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1. Jumlah PUS anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri 2. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif 3. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif	22.000 34 3	330.000 ^{K)} 170 ^{K)} 15 ^{K)}	Program Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	135,72
6.	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas ¹⁾	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.103.210	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kemendiknas	59.599,10
7.	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB ¹⁾	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.195.700	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kemendiknas	31.512,20
8.	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	800.000	Program Pendidikan Menengah	Kemendiknas	6.530,60
9.	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	645.298	Program Pendidikan Menengah	Kemendiknas	9.243,00
10.	Penyediaan Layanan Kelembagaan ¹⁾	Tersedianya keluasan dan pemerataan akses PT yang bermutu dan berdaya saing internasional	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65.000	70.000	Program Pendidikan Menengah	Kemendiknas	5.211,30

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
11.	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu ¹⁾	Tersedianya beasiswa miskin MI, MTs, MA	1. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MI	640.000	640.000	Program Pendidikan Islam	Kemenpag	1.152,00
			2. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MTs	540.000	540.000			1.944,00
			3. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MA	320.000	320.000			1.216,00
12.	Penyediaan Subsidi Pendidikan Tnggi Islam/	Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin	Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PTA	59.538	59.538	Program Pendidikan Islam	Kemenpag	788,50
13.	Bantuan Tunai Bersyarat	Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH (RTSM)	816.000	4.506.000 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos	8.985,00
14.	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat dan anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan	159.500	26.300	Program Rehabilitasi Sosial	Kemensos	1.717,11
15.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia telantar	Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	22.040	51.420	Program Rehabilitasi Sosial	Kemensos	635,06
16.	Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	34.900	75.640	Program Rehabilitasi Sosial	Kemensos	1.293,72
17.	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	40.000	247.900 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos	2.340,22
18.	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana sosial	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	43.000	266.900 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos	945,12
19.	Penanggulangan Kemiskinan	Terselurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP	Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)	12.793	80.028 ^{K)}	Program Pemberda-yaan Sosial	Kemensos	2.701,17
			Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit)	6.150	38.420 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
20.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit)	2.300	3.720	Program Pemberda-yaan Sosial	Kemensos	738,19
			Pemberian jaminan hidup (KK)	4.270	7.010			
21.	Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)	Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran dengan jumlah yang memadai dalam 1 tahun	Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	17.500.000		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra/ Perum Bulog	11.800,00
22.	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Terwujudnya redistribusi tanah	Terlaksananya redistribusi tanah (bidang)	210.000	1.050.000 ^{ks)}	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	912,70
23.	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat	1. Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara (orang)	24.000	384.000 ^{ks)}	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kemenakertrans	856,73
			2. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara (kab/kota)	231	360			
24.	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan - Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	1. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	3.000	28.200 ^{ks)}	Program perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kemenakertrans	212,10
			2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	100	100			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
II.	Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPB Mandiri							
25.	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial	8.500	482	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. PU	5.980,00
26.	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan)	1. Cakupan penerapan PNPB-MP dan Penguatan PNPB (kec)	4.791	4.949	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kemendagri	48.781,30
			2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan (kecamatan)	9	-			39,80
27.	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	237 kecamatan (RISE)	1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	237	237	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. PU	1.188,00
		Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPB+PPIP)	2. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman	3.900	1.226			3.198,00
28.	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan	210 kab/kota (SANIMAS)	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>on-site</i> (kab/kota)	30	210 ^{ki}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. PU	331,00
29.	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.650 desa (PAMSIMAS)	Jumlah desa yang terfasilitasi	1.472	4.650 ^{ki}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. PU	4.224,00

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
30.	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang <i>bankable</i> 1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM (unit) 2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK (kab/kota) 3. Tenaga pendamping (orang) 4. Kelompok Usaha Mikro (usaha)	100 120 480 800.000	100 120 480 800.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	1.300,61
31.	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	1. Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR) (triliun) 2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian (triliun) 3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	1,5 4 200 10.000	2,5 8 200 10.000	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementan	4.500,01
32.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPMD ²⁾	Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal	Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal	51	80	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	2.491,09
33.	Peningkatan PNPMD Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPMD bidang pariwisata	Jumlah desa wisata	200	350	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	406,00
III.	Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif	Meningkatnya jangkauan dan jenis sumberdaya produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha koperasi dan UMKM	a. Jumlah koperasi dan UMKM yang memanfaatkan sumberdaya finansial dan non-finansial b. Jumlah bank dan lembaga keuangan non-bank yang melayani nasabah koperasi c. Volume kredit/pembiayaan yang disalurkan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk koperasi dan UMKM.					

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
34.	Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR	100	100	Program Penempatan Modal Negara Dalam Rangka Mendukung Program KUR	Kemenkeu (Anggaran 99)	10.000,00
35.	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase rekomendasi kebijakan KUR yang terimplementasikan	60	80	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perencanaan	Menko Perekonomian	3,10
36.	Pemasarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.	Terselenggara-nya pemasarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.	1. Jumlah peserta pemasarakatan kewirausahaan (orang)	2.000	10.000 ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	13,60
			2. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMKM peserta diklat kewirausahaan (orang)		6.000 ^{ki}			8,16
37.	Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.	Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.	1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis (orang)	1.000	5.000 ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	2,50
			2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi (orang)	-	7.000 ^{ki}			6,00
38.	Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.	a. Tersedianya dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.	1. Jumlah teknologi tepat guna yang dikenalkan kepada usaha mikro dan kecil (paket kegiatan)	-	20 ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	10,00
			2. Jumlah usaha mikro dan kecil yang menerima dukungan teknologi tepat guna (UMKM)	350	1.750 ^{ki}			11,75
		b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas	Pengembangan dan Pelayanan Bisnis KUKM melalui Trading Board (KUKM)	3.000	15.000 ^{ki}	6,00		

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
39.	Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengem-bangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.	1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya (MOU)	5	25 ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	8,15
			2. Terfasilitasi-nya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional (Prov)	8	33 ^{KJ}			15,70
			3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage	100	500 ^{KJ}			1,75
			4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank	100	500 ^{KJ}			5,00
			5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah	2	12 ^{KJ}			10,00
40.	Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengem-bangan jaringan informasinya.	Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.	Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk - (KSP-KJKS)	100	500 ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	13,10
			LMVD	1	5 ^{KJ}			
41.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM. 2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan LKM	Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.	100	500 ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	2,50
			1. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.		4.000 ^{KJ}			4,00
			2. Jumlah SDM Pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat (orang)	1.200	6.000 ^{KJ}			5,00
			3. Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat (unit)		8 ^{KJ}			6,00
			4. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM (orang)	900	4.500 ^{KJ}			5,00

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
42.	Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung penelarasannya dengan program-program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM	1. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat.	1. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat (Provinsi)	7	33 ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	5,00
			2. Jumlah UMKM yang diseleksi untuk mendapatkan pembiayaan melalui sertifikasi tanah		80.000 ^{K)}			14,00
			3. Persentase UMKM yang dibina setelah mendapatkan sertifikasi tanah	20	15			1,50
		2. Meningkatnya Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/ program Pemda, BUMN (PKBL), CSR dan lembaga swadaya masyarakat.	Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/program Pemda, BUMN (PKBL), CSR dan lembaga swadaya masyarakat	50	250 ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	7,50
		- Jumlah UMKM	500	2.500 ^{K)}				
43.	Penyediaan skim-skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial tanggung renteng, dan sistem penjaminan kredit.	Tersedianya skim-skim pembiayaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro.	Jenis-jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro (jenis skim)	5	25 ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	25,00
			Pelaku usaha mikro/keperasi yang mendapatkan bantuan dana	2.600	7.900 ^{K)}			395,00
III.	Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku	Outcomes: Menigkatnya efektifitas pelaksanaan program PK di daerah						
44.	Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran	1. Jumlah kegiatan dan koordinasi kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan, kajian kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran		10	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	15,14

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
45.	Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK	1. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi kelembagaan TKPK 2. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan		12	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	13,46
46.	Koordinasi Penguatan Masyarakat dan Kawasan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan	1. Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat 2. Jumlah sinkronisasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di bidang penguatan masyarakat dan kawasan		8	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	7,56
47.	Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan	Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan		5	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	17,13
48.	Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG	1. Jumlah pengusaha mikro yang telah mendapatkan kredit modal usaha 2. Jumlah kegiatan/lembaga hasil sinkronisasi pengembangan akses sumber pendanaan bagi usaha mikro		8	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	7,10

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha mikro					
			4. Persentase pelaksanaan rekomendasi pembentukan LPDA-PK dan DME sebagai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro					
TOTAL								270.005,50

Catatan:

1. ¹⁾ merupakan angka program, bukan angka kegiatan
2. ²⁾ masih merupakan usulan dari kegiatan P2DTK Fase I
3. ³⁾ Angka Kumulatif 5 Tahun (2010-2014).

**RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010 - 2014**

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
KEGIATAN ADAPTASI								
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA								
1	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	55 2	51 1		Kemenkes	1.254,00
BIDANG EKONOMI								
1	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Meningkatnya koordinasi urusan ketahanan pangan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan	50%	90%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN / Deputi Bidang Koordinasi Pertanian Dan Kelautan (Deputi II)	19,45

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
BIDANG SARANA DAN PRASARANA								
1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 43.4 m3/det dan terjaganya layanan air baku dengan kapasitas 44.8 m3/det	Kapasitas air baku yang ditingkatkan sebesar 43,4 m3/det	7,6 m3/det	43,4 m3/det ^{K)}	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	5.549,40
			Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi sebesar 12,3 m3/det	2,5 m3/det	12,3 m3/det ^{K)}			700,00
			Kapasitas prasarana air baku yang terjaga sebesar total 44,8 m3/det	5,5 m3/det	44,8 m3/det ^{K)}			100,01
2	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 21,5 m3/det	Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun sebanyak 12 waduk dan 158 embung/situ	1 waduk selesai dibangun; 5 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 20 embung/situ selesai dibangun	11 waduk dan 158 ^{K)} embung/situ selesai dibangun	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	6.481,29

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi sebanyak 29 waduk dan 298 embung/situ	2 waduk selesai di rehabilitasi, 9 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 37 embung/situ selesai direhabilitasi	29 waduk selesai di rehabilitasi, dan 298 embung/situ selesai direhabilitasi			1.845,26
			Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 182 waduk/embung/situ	182 waduk/embung/situ	166 ^{k)} waduk/embung/situ			1.320,00
			Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi sebanyak 15 kawasan	9 kawasan	15 kawasan ^{k)}			645,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terkendalinya bahaya banjir, meningkat dan terjaganya ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo (7 waduk)	1 Waduk Bendo (Ponorogo)	1 Waduk Bendo ^{K)} (Ponorogo)	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum	900,00
				1 Wadung Gondang (Sragen)	1 Wadung Gondang ^{K)} (sragen)			306,00
				Penyelesaian 1 Waduk Gonggang	1 Waduk Gonggang ^{K)}			20,00
				1 Waduk Kresek (Madiun)	1 Waduk Kresek ^{K)} (Madiun)			457,00
				1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)	1 Waduk Kedung ^{K)} Bendo (Pacitan)			553,00
					1 Waduk Kendang ^{K)} (Blora)			107,00
					1 Waduk Pidekso (Wonogiri)			1 Waduk Pidekso ^{K)} (Wonogiri)
		Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi	Penanganan Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang	Tertanganinya ^{K)} Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang	1.060,00			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
				Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)	Rehabilitasi 7 Waduk ^{k)} (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)			25,00
				Rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan	Terehabilitasi ^{k)} Embung / Waduk Lapangan			105,00
			terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo	Operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo	Terlaksananya ^{k)} operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo			180,00
			terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo		Terkonservasinya 2 ^{k)} Kali (Kali Tirtomoyo & Kali Asin)			130,00
					Terkonservasinya ^{k)} arboretum Sumber Daya Air Bengawan Solo			60,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Air Tanah	Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi, 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar	Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan (144,58 ribu hektar)	115 ribu hektar	129,38 ribu hektar ^{K)}	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	2.924,00
			Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (1,34 juta hektar)	200 ribu hektar	1,34 juta hektar ^{K)}			13.000,00
			Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (2,315 juta hektar)	2,315 juta hektar	2,315 juta hektar ^{K)}			2.000,00
			Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan (10 ribu hektar)	10 ribu hektar	10 ribu hektar ^{K)}			60,00
			Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (450 ribu hektar)	85 ribu hektar	450 ribu hektar ^{K)}			1.700,00
			Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (1,2 juta hektar)	800 ribu hektar	1,2 juta hektar ^{K)}			1.000,00
			Jumlah sumur air tanah yang dibangun (70 sumur air tanah)	70 sumur air tanah	70 sumur air tanah ^{K)}			77,00
			Jumlah sumur air tanaha yang direhabilitasi (1.875 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 37.500 hektar	230 sumur air tanah	1.875 sumur air tanah ^{K)}			615,80

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (2.192 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 43.840 hektar	425 sumur air tanah	2.192 sumur air ^{*)} tanah			219,20
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (seluas 1.000 hektar)	1.000 hektar	1.000 hektar ^{*)}			7,50
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (seluas 175 ribu hektar)	4.000 hektar	175.000 hektar ^{*)}			525,00
			berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo	Pengembangan DI & Drainase Bengawan Jero / rawa Jero	Berkembangnya DI ^{*)} & Drainase Bengawan Jero / rawa Jero			380,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung berapi/sedimen	Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)	168 km	216 km ^{ki}	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	2.508,65
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)	139 km	386 km ^{ki}			3.745,00
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar	700 km	2.000 km ^{ki}			927,50
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m3	28 buah	28 buah ^{ki}			116,50

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m ³	4 buah	85 buah ^{K)}			145,00
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m ³	10 buah	150 buah ^{K)}			75,00
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km)	30 km	30 km ^{K)}			200,00
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km)	3 km	50 km ^{K)}			278,45

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km)	30 km	50 km ^{k)}			50,00
		Terkendalnya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	terbangunnya prasarana pengendali banjir	pompa banjir di 5 lokasi	pompa banjir di 5 ^{k)} lokasi	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum	40,00
				kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo	kawasan retensi di 3 ^{k)} Sungai di Ponorogo			50,00
				1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage	1 Bendung ^{k)} Gerak/Bojonegoro Barrage			260,00
				Jabung Ring Dike	Jabung Ring Dike ^{k)}			460,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
				Remaining Works LSRIIP-phase I	Remaining Works ^{k)} LSRIIP-phase I			100,00
				1 Bendung Gerak Sembayat	1 Bendung Gerak ^{k)} Sembayat			650,00
				Tanggul Kota Ngawi	Tanggul Kota Ngawi ^{k)}			61,00
				Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro	Pengaturan kawasan ^{k)} rawan banjir Bojonegoro			40,00
				Flood Forecasting Warning System (FFWS)	Flood Forecasting ^{k)} Warning System (FFWS) Bengawan Solo			40,00
					Tanggul Kiri ^{k)} Bengawan Solo Rengel-Centini			480,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			terehabilitasinya prasarana pengendali banjir	pintu air Demangan	pintu air Demangan ^{k)}			130,00
				Normalisasi 3 Sungai (Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)	Normalisasi Kali 3 ^{k)} sungai (Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)			170,00
					Perbaikan dan ^{k)} Pengaturan Kali Madiun (Kwadungan-Ngawi)			540,00
				Normalisasi Kali Lamong	Normalisasi Kali ^{k)} Lamong			1.100,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
				Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)	Perbaikan Sungai ^{k)} Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)			2.005,00
				Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun	Rehabilitasi Pasca ^{k)} Banjir Kali Madiun			120,00
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG								
1	Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana	1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi 2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)	1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan 2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB)	5	33 ^{k)}	Program Penanggulangan Bencana	BNPB	957,64
2	Tanggap darurat di daerah terkena bencana	Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah	55	585 ^{k)}	Program Penanggulangan Bencana	BNPB	137,89

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut	Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang ditetapkan (per tahun)	3	19 ^{ki}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	75,90
			% capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir [akumulatif]	10%	50%			
			Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)	5	41 ^{ki}			
			Jumlah model implementasi kebijakan di regional	5	25 ^{ki}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	95,70
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L	20%	100%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	100%			
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	100%			
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	6,7%	100%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	100%			
			Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33			
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	100%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian	2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya	15 juta ha ^{k)}	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	295,10
			Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian)	12 paket	11 paket			
4.	Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia	Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)	21.000	31.625	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Kementan	2.418,69

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)	76	90			
			Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)	0	10.000			
			Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)	100	300			
			Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan horti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)	75	110			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	25.709	74.648	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan	2.979,69
			Konservasi DAS Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)	9.600	160.000 ^{K)}			
			Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 unit	235	6.500 ^{K)}			
			Terlaksananya Pengembangan Systeme of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim)	62	2.000 ^{K)}			
			Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil	726	200.000 ^{K)}			
			Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi	952	12.500 ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6	Pendayagunaan pesisir dan lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	• Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.	60 ha	5.000 ha ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	404,50
			Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.					
			- BMKT	2 kapal	12 kapal ^{K)}			
			- Garam	50 ribu ton	500 ribu ton ^{K)}			
			- Deep sea water	200 ribu liter	7,2 juta liter ^{K)}			
7	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3	15 ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	260,70
				1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	5 paket data terkait ^{K)} fenomena alam laut, 25 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
8	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan	Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energy terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan	Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	9	45 ^{k)}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	242,80
9	Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha ▪ Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat 	900 ribu ha 9 Kawasan dan 3 jenis	4,5 juta ha ^{k)} 9 Kawasan dan 3 jenis	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	745,50

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
10	Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini 	6 kawasan	50 kawasan ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	481,10
				23 kawasan	145 kawasan ^{K)}			
KEGIATAN MITIGASI								
BIDANG EKONOMI								
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang energi alternatif	Persentase rekomendasi Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang telah terimplementasi	50%	90%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN / Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral Dan Kehutanan (Deputi III)	13,00
2	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati	Persentase hasil rekomendasi kebijakan hasil koordinasi yang diimplementasikan pengembangan bahan bakar nabati	40%	75%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN	3,65

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi	Meningkatnya koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi	Persentase rekomendasi kebijakan hasil sinkronisasi yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi	40%	70%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN / Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral Dan Kehutanan (Deputi III)	3,70
BIDANG SARANA DAN PRASARANA								
1	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	75 buah NSPK	Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan yang tersusun	3 NSPK air limbah; 2 NSPK drainase; 3 NSPK persampahan	25 NSPK air limbah; ^{KJ} 20 NSPK drainase; 30 NSPK persampahan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Ditjen Cipta Karya, Kemen. PU	67,70
		426 Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK	Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	34 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 8 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 22 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan	266 Bantek, Bintek, ^{KJ} dan pendampingan (SSK) air limbah; 50 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 150 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan			644,68

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		65 paket diklat	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan	6 paket diklat pengelolaan air limbah; 2 paket diklat pengelolaan drainase; 2 paket diklat pengelolaan persampahan	35 paket diklat ^{k)} pengelolaan air limbah; 15 paket diklat pengelolaan drainase; 15 paket diklat pengelolaan persampahan			129,52
		426 kegiatan monev	Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan	34 kegiatan monev air limbah; 7 kegiatan monev drainase; 21 kegiatan monev persampahan	226 kegiatan monev ^{k)} air limbah; 50 kegiatan monev drainase; 50 kegiatan monev persampahan			54,90
		15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi persampahan	Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	2 kegiatan fasilitasi	15 kegiatan fasilitasi ^{k)}			15,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		peningkatan pelayanan air limbah di 221 kab/kota	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site	11 kab/kota sistem off-site; 30 kab/kota sistem on-site	55 kab/kota sistem ^{k)} off-site; 210 kab/kota sistem on-site			4.458,00
		penanganan drainase di 50 kab/kota (4.600 Ha)	Pembangunan drainase perkotaan	26 kab/kota	45 kab/kota			3.204,00
		peningkatan TPA di 210 kab/kota , sarana pengumpul sampah sebanyak 250 unit , persampahan terpadu 3R di 250 lokasi	Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R	55 kab/kota peningkatan TPA dan 50 lokasi persampahan terpadu 3R	315 kab/kota ^{k)} peningkatan TPA, 300 unit pengumpul sampah dan 200 lokasi persampahan terpadu 3R			5.500,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggaranya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan	1 Paket	583 Paket ^{k)}	Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat	Kemen. Perhubungan	282,46
		Terselenggaranya Transportasi Perkotaan	Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan	1 Paket	5 Paket ^{k)}			379,22
		Transportasi Ramah lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan	1 Paket	5 Paket ^{k)}			87,55
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG								
1	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar	1. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan : - Pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME	14 desa di 13 provinsi	20 desa di 20 provinsi	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri	40,45

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Pengelolaan Desa Hutan	4 desa, 4 provinsi	22 desa, 21 provinsi ^{k)}			
			- Pengelolaan Hutan Mangrove	1 desa, 1 provinsi	7 desa, 7 provinsi ^{k)}			
			2. Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bintek, rakor, BLM, dan monev (termasuk PNPM-LMP yang fokus kegiatannya pada penanganan lingkungan perdesaan dan mikrohydro)	33 Provinsi, 23 Kab dan 72 Kec	33 Provinsi	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri	131,18
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Pengembangan Jalan	120 Km	483,559 Km ^{k)}	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	899,45
			Pengembangan Drainase	14,4 Km	47,84 Km ^{k)}			
			Pengembangan Sarana Air Bersih	3.150.000 liter	11.155.452 liter ^{k)}			
			Pengembangan Energi Terbarukan	-	71.200 Watt ^{k)}			
			Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	32 Unit	190 Unit ^{k)}			
			Rehabilitasi Rumah Transmigran	700 Unit	1.680 Unit ^{k)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi	24 Dok	112 Dok ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	465,75
			Jumlah mitigasi lingkungan	13	94 ^{K)}			
			Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan	5 Pkt	25 Pkt ^{K)}			
		Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri	12 kimtrans	132 kimtrans ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi	1 kimtrans	5 kimtrans ^{K)}			
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan	1 Dok	8 Dok ^{K)}			
			Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan	-	44 Kws ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	7 Kws	22 Kws ^{K)}			
		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi	4 Dok	26 Kws ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	2 kimtrans	16 kimtrans ^{K)}			
			Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan	1 Pkt	5 Pkt ^{K)}			
		Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri	2 kimtrans	21 kimtrans ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi	1 kimtrans	5 kimtrans ^{K)}			
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan	1 Dok	5 Dok ^{K)}			
			Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi	-	12 Kws ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	2 Kws	9 Kws ^{K)}			
		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi	6 Dok	28 Dok ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	3 kimtrans	25 kimtrans ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)	Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri	4 kimtrans	38 Kimtrans ^{K)}			
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan	1 Dok	12 Dok ^{K)}			
			Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi	-	12 Kws ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	1 Kws	9 Kws ^{K)}			
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	220	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	120,84

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	245			
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	330			
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	720			
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	12,5% ^{K)}			
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	26 ^{K)}			
2	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau	Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan	2	37 ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	104,80

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak	4	36 ^{ki}			
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)	4	36 ^{ki}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, <i>land use planning</i>)	2	10 ^{K)}			
			Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya	16	36			
			Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak	5	25 ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tersedianya perangkat kebijakan dan terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfer & mengendalikan dampak perubahan iklim	Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	3	17 ^{ko}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	96,60
			% penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO	100%	100%			
			Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO	-	6			
			% penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC	100%	100%			
			% pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC	-	10%			
			Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim	3	11			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	5	50 ^{ko}			
			Implementasi konsep Program Kampung Iklim	2	22 ^{ko}			
4	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	15 ^{ko}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	143.29
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait	80%	80%			
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%			
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau	100%	100%			
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	30			
			% rekomendasi kebijakan konservasi an pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.	Konflik dan tekanan kawasan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%	1%	5%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemenhut	1.381,30
			Pengelolaan ekosistem esensial, termasuk peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, sebagai kawasan penyangga kehidupan meningkat 10%.	2%	10%			
			Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)	2 Prov	12 Prov			
			Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun	1 paket	5 paket			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6	Penyidikan dan Perlindungan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan hak negara atas hutan	Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%	15%	75%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemenhut	836,70
			Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun	25%	76,3%			
			Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%	4%	20%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
7	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.	20%	67,2%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemenhut	1.275,00
			Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008	10%	50%			
			Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS	6 DAOPS	30 DAOPS			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
8	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	800.000 Ha	2.000.000 Ha	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemenhut	6.239,20
			Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	100 Klpk	500 Klpk			
			Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm	10 Unit	50 Unit			
			Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi	4 Prov	32 Prov			
			Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha	50.000 Ha	250.000 Ha			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten	6 Kab	30 Kab			
			Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	100.000 ha	500.000 ha			
9	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha	160.000 ha	800.000 ha	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemenhut	8.222,50
			Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha	100.000 ha	500.000 ha			
			Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha	1.000 ha	5.000 ha			
			Fasilitas rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 ha	295.000 ha			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
10	Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam	Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 %	1%	5%	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Kemenhut	275,70
			Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 %	10%	50%			
			50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu	10%	50%			
			Pengelolaan LOA oleh IUPHHK-HA/RE seluas 2,5 juta ha	300.000 ha	2.500.000 ha			
11	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung	Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi	4 Prov	28 Prov	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut	189,00
			Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia	4 Prov	28 Prov			
			Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi	4 Prov	28 Prov			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul	2 Judul	4 Judul			
			Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%.	15%	90%			
12	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan	Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul	1 judul	4 judul	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut	298,50
			Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia	50%	100%			
			Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul	2 judul	8 judul			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
13	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	Terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon	16%	80%	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut	53,50
			Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	15%	80%			
			Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi	6 Prov	32 Prov			
			Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	1 Judul	1 Judul			
14	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.	Ketersediaan dan Termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang lansekap hutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul	20%	100%	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Kemenhut	113,40
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.	20%	100%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
15	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri	Jumlah laporan pengembangan kapasitas dalam negeri (infrastruktur cadangan strategis minyak bumi dan BBM)	1 lap	5 lap ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM	7,51
			Jumlah laporan pemutakhiran kapasitas penyimpanan dalam negeri (peta dan data fasilitas pengangkutan dan penyimpanan migas)	2 lap	10 lap ^{K)}			2,76
			Jumlah laporan kapasitas pengangkutan (pemetaan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan fasilitas pendistribusian bahan bakar minyak dan gas)	1 lap	5 lap ^{K)}			2,76
			Jumlah laporan produksi (monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang migas)	1 lap	5 lap ^{K)}			3,60
			Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur	73,36%	73,60%			15,43

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Laporan penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total	6 lap	30 lap			115,53
			Jumlah laporan Desa Mandiri Energi berbasis BBN (pengawasan, pembinaan dan pengembangan DME)	2 lap	10 lap			16,58
			Jumlah laporan penjualan hasil olahan migas	3 lap	15 lap			15,58
			Jumlah laporan kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia	3 lap	9 lap			11,05
			Jumlah laporan penambahan kapasitas Depot	4 lap	20 lap			12,71
			Jumlah laporan Indeks kepuasan konsumen bahan bakar	4 lap	20 lap			35,48
			Jumlah laporan usaha pengolahan minyak bumi	1 lap	5 lap			3,60
			Jumlah laporan usaha pengolahan gas bumi	1 lap	5 lap			3,60
			Jumlah laporan usaha pengolahan Hasil Olahan	1 lap	5 lap			3,60
			Jumlah laporan usaha pengangkutan	1 lap	5 lap			3,60
			Jumlah laporan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	1 lap	5 lap			6,63

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah laporan usaha penyimpanan	1 lap	5 lap ^{KJ}			2,21
			Jumlah laporan usaha niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan	1 lap	5 lap ^{KJ}			3,44
			Jumlah usaha niaga gas bumi melalui pipa	1 lap	5 lap ^{KJ}			3,44
			Jumlah rekomendasi pemantauan realisasi ekspor minyak dan evaluasi stok minyak mentah	2 lap	10 lap ^{KJ}			8,50
			Jumlah pelanggaran regulasi usaha hilir (Sosialisasi dan menyusun peraturan, pameran)	1 pkt	5 pkt ^{KJ}			10,64
			Laporan prosentase penghematan BBM Bersubsidi	2 lap	10 lap ^{KJ}			15,73
			Laporan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG	1 lap	5 lap ^{KJ}			20,11
16	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pengelolaan, pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM	Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM			Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM	3,50
			Jumlah laporan evaluasi cadangan migas dan CBM	1 lap	5 lap ^{KJ}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			a. Potensi Cadangan Minyak (MMSTB)	8.363,19	8.651,18			
			b. Potensi Cadangan Gas Bumi (TSCF)	170,7	172			
			c. Potensi Cadangan CBM (TSCF)	-	24			
			Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM	163,64 BBOE	190,76 BBOE			6,25
			Jumlah laporan sumber daya migas dan CBM di seluruh cekungan Indonesia	1 lap	5 lap ^{k)}			
			Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I	2	37 ^{k)}			6,59
			Jumlah persetujuan harga gas bumi	15	78 ^{k)}			7,69
			Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak	3	15 ^{k)}			2,00
			Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.	2	21 ^{k)}			2,37

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.	97%	99%			4,52
			Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.	90%	95%			4,42
			Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.	90%	95%			5,85
			Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan.	20%	60%			1,31
			Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.	100%	100%			5,52

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
17	Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi mikro hidro (MW)	1,53	11,94	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	68,96
			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp)	3,55	24,78			492,57
			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi angin (MW)	0,00	5,64			
			Kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW)	0	0,1			
			Jumlah desa mandiri energi (desa)	50	250 ^{k)}			300,00
			Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi & pilot)	1 studi	5 studi & 10 pilot ^{k)}			30,00
			Jumlah gedung dan industri yang menerima layanan audit energi (objek)	185	370 ^{k)}			115,39
			Jumlah regulasi di bidang energi baru terbarukan (buah)	4	10 ^{k)}			9,26
			Jumlah regulasi di bidang efisiensi energi (buah)	3	12 ^{k)}			3,80

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
18	Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah	Tercapainya target PNBP dari sektor panas bumi	- Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan panas bumi	1 pkt	5 pkt ^{k)}	Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi Dan Air Tanah	KESDM	18,77
			Jumlah pemanfaatan langsung energi panas bumi	0	5 ^{k)}			
		Tercapainya target pemanfaatan langsung panas bumi	- Pelaksanaan penugasan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi	6	30 ^{k)}			4,61
		Tersedianya data potensi panas bumi yang menarik bagi investor	- Inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	33 ^{k)}			10,47
			Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	33 ^{k)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
19	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi	Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya Panas bumi	22	110 ^{k)}	Penelitian, Mitigasi Dan Pelayanan Geologi	KESDM	154,71
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya Batubara dan CBM	18	90 ^{k)}			480,73
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya Gambut dan Bitumen Padat	5	25 ^{k)}			16,58
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya mineral	28	144 ^{k)}			88,41
KEGIATAN PENDUKUNG								
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI								
1	Penguatan Kebijakan Iptek dan Dukungan Litbang untuk Penurunan Emisi Gas CO2 dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kebijakan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kebijakan	5	25 ^{k)}	Peningkatan Kemampuan IPTEK untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	KRT	49,00
			Jumlah riset bersama	5	25 ^{k)}			
2	Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global	Model fisik kolamkultur penyerapan CO2, penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare	Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan carbon sink dan Pilot Plant Fotobioreaktor untuk penyerap CO2	1	5 ^{k)}	Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	14,85

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Penelitian Geoteknologi	Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim	Paket pengumpulan data	1	1 K)	Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI	10,00
			Paket dokumen ilmiah		1 K)			
4	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia – Kebun Raya Bogor	Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah	Kebun raya (paket kawasan)	2	14 K)	Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI	25,00
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik	50%	80%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	899,67
			Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan	50%	80%			
			Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim	50%	80%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan data dan informasi di bidang Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim	Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	75% 75%	95% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	151,56
3	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami	Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami	100% 90% 90%	100% 90% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	515,04
3	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	Tersedianya pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara	Jumlah pelayanan informasi iklim agroklimat dan iklim maritim	70%	90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	46,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	65%	90%			
4	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim	Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi maritim	40%	85%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	395,35
			Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi penerbangan	40%	85%			
			Frekuensi pelayanan informasi meteorologi maritim	365	1460			
			Ketersediaan data meteorologi	680	890			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5	Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu	Tersedianya peralatan pengamatan seismoteknik, geopotensial dan tanda waktu	40	300 ^{ko}	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	62,48
			Kesinambungan (sustainabilitas) sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu	90%	90%			
			Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu	90%	90%			
6	Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG	Tersedianya kebijakan teknis bidang instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi	Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun	17	107 ^{ko}	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	172,92
			Persentase informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal	10%	30%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
7	Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG	Tersedianya kebijakan teknis bidang jaringan komunikasi	Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun	63%	100%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	127,93
			Persentase informasi pengelolaan jaringan komunikasi	90%	90%			
8	Pengelolaan Data Base BMKG	Tersedianya mekanisme yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan database	Jumlah kebijakan database yang disusun	11	86 ^{ko}	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	68,00
			Persentase informasi pengelolaan database secara maksimal	20%	100%			
9	Pengembangan UPT BMKG	Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG	Persentase Pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia	80%	90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	688,69

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
10	Penelitian dan Pengembangan BMKG	Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi	0	75 ^{ki}	Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya BMKG	BMKG	81,72
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi	0	40 ^{ki}			
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara	0	16 ^{ki}			
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika	0	92 ^{ki}			
			Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional	0	51 ^{ki}			
			Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan	0	30 ^{ki}			
			Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan	0	34 ^{ki}			
TOTAL								110.270,37

**RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN**

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI								
1	Penelitian Oceanografi	Data potensi bahan obat dari makro algae dan sponge; biota laut di ekosistem terumbu karang; abalon, dan rajungan; serta sistem informasi oseanografi	Publikasi makalah	37	58	Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI	62,0
			Proto tipe	7	10			
			Konsep	6	8			
		Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang	3	3	67,4			
BIDANG SARANA DAN PRASARANA								
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian	Terbanggunya sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar	unit (menara suar; rambu suar; pelampung suar)	18; 23 ; 30	SBNP terdiri 93 ^{K)} menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.127,6
		Terbanggunya dan meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy	unit (menara suar; lampu suar; bouy)	-	71 ; 215 ; 50 ^{K)}			567,8
		Tersedianya 922 unit suku cadang SBNP	unit suku cadang	170	922 ^{K)}			154,0
		Terbanggunya gedung SROP dan sistem telekomunikasi pelayaran sebanyak 188 SROP (Sistem Radio Operasi Pantai)	unit gedung SROP dan tower	42	188 ^{K)}			588,1
		Tersedianya 600 unit perangkat radio	unit Perangkat Radio	200	600 ^{K)}			54,0
		Terpasangnya 39 paket <i>Vessel Traffic System</i> di Selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya	paket	15	39 ^{K)}			1.025,0
		Tersedianya 22 unit Suku Cadang SROP	unit	5	22 ^{K)}			44,0
		10 unit CCTV	unit	5	10 ^{K)}			18,0
		15 unit AIS (<i>Automatic Identification System</i>)	unit AIS	7	15 ^{K)}			11,3
		Terbanggunya 7 dermaga kapal kenavigasian	Dermaga	2	7 ^{K)}			55,0
		Tersedianya 15 unit Inspection boat-navigasi	unit Inspection boat-navigasi	1	15 ^{K)}			120,0

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Tersedianya 72 unit kapal patroli KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai)	unit kapal patroli	22	72 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.516,0
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan	Tersedianya 29 unit kapal <i>Marine Surveyor</i>	unit kapal Marine Surveyor	9	29 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	23,9
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tersedianya 32 unit kapal penumpang	Unit	2	32 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.493,8
		Tersedianya 2 unit kapal penumpang	unit	-	2 ^{K)}			1.300,0
		Tersedianya 76 Trayek subsidi perintis di wilayah terpencil	Trayek	60	76			2.135,0
6	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pelayaran	Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan 61.7150.00 m3 sedimen	volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3)	6	21 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	880,00
		Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.	Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab	5 Lokasi	25 lokasi ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	4.792,0
		Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	lokasi	-	1 lokasi			1.500,0
		Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan	lokasi	-	1 lokasi			2.000,0
		Meningkatnya kapasitas 125 pelabuhan non perintis	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun	25 Lokasi	125 lokasi ^{K)}			1.750,0
		Meningkatnya jumlah dan kapasitas pelabuhan perintis	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun	30 Lokasi	150 lokasi ^{K)}			1.750,0
7	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	115 rute perintis	Jumlah rute perintis yang terlayani	118	115 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan	892,4
		19.006 drum BBM		3.766	19.006 ^{K)}			39,7

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
8	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp) Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi dan pilot)	3,55	102 ^{K)}	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	492,57
				1 studi	1 studi dan 4 pilot			30,00
9	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan, Kewilayahan dan Kelautan	Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan	1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri	14 telaahan	70 telaahan ^{K)}	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Kemenlu	64,2
			2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan hukum internasional	13 telaahan	65 telaahan ^{K)}			
			3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional	6 Kali	30 kali ^{K)}			
			4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional	49 dokumen	245 dokumen ^{K)}			
			5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau	12 kali Perundingan	60 kali ^{K)}			
			6. Tersusunnya dokumen tentang <i>Ocean Policy</i>	Penyusunan Rancangan Dokumen tentang <i>Ocean Policy</i>	Tersedianya dokumen tentang <i>Ocean Policy</i>			
BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN								
10	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara	Peningkatan penyelenggaraan operasi militer selain perang Matra Udara dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP Matra Udara	30%	35%	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU	5,6

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
11	Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	Menurunnya angka pelanggaran hukum di Laut	Menurunnya angka pelanggaran hukum di Laut (paket)	3	23 ^{K)}	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla	232,0
12	Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan keamanan laut	Penyelesaian sistem early warning dan sea surveillance termasuk integrasinya	15%	100%	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla	585,4
13	Pembinaan Kepolisian Perairan	Meningkatkan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai	Jumlah prosentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut .	10%	11%	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	POLRI	71,3
BIDANG WILAYAH								
14	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan.	Kualitas kerjasama, sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional.	2	10 ^{K)}	Program Survei dan Pemetaan Nasional	Bakosurtanal	109,7
			Survei batimetri lepas pantai line km	13.680	68.400 ^{K)}			
			Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km	34.000	265.000 ^{K)}			
			Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km	30.000	225.000 ^{K)}			
			Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K	52	292 ^{K)}			
			Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan	1	5 ^{K)}			
			Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan	4	41 ^{K)}			
			Pembuatan Peta LBI	2	15 ^{K)}			
			Pembuatan peta navigasi udara (<i>Aeronautical Chart</i>)	8	51 ^{K)}			
			Peta Resmi tingkat peringatan tsunami	2	16 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
15	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut.	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut.	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH tematik matra laut Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut	1 18 NLP(@5 tema) dan 4 dok 33 Prov, 6 K/L	5 ^{KJ} 90 NLP(@5 tema) dan 20 dok 33 Prov, 6 K/L	Program Survei dan Pemetaan Nasional	Bakosurtanal	66,4
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
16	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut	Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang ditetapkan (per tahun) % capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir [akumulatif] Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun) Jumlah model implementasi kebijakan di regional	3 10% 5 5	19 ^{KJ} 50% 41 ^{KJ} 25 ^{KJ}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	75,9
17	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim	Persentase Tingkat kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Maritim Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Penerbangan Frekuensi Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim Ketersediaan data meteorologi	40% 40% 365 680	85% 85% 4.380 ^{KJ} 3.875 ^{KJ}	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	395,4

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
18	Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan geologi kelautan	Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan	13	17	Program Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	KESDM	125,3
19	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akurat, tepat waktu.	• Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI	6 prov	33 prov	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	354,6
			• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)	8 prov	40 prov ^{K)}			
			• Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya	1 WPP	11 WPP 33 prov			
			• Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya	11 prov	27 prov ^{K)}			
20	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP	Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan	500 unit	700 unit	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	384,0
			Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar	600 unit	2,929 unit			
			Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi	60 orang	240 orang			
21	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.	Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial	968 unit	988 unit	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	6.084,8
			Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk	35 Lokasi	190 Lokasi ^{K)}			
			Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	10	50			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
22	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap	8.000 SIUP, SIPI/SIKPI	12.000 SIUP, SIPI/SIKPI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	200,9
			Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.500	4.500			
			Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP	4.900 SIPI	8.900 SIPI			
23	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.	Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	424,1
			Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.	999 KUB	1.800 KUB			
			Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable	999 KUB	1.800 KUB			
24	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar.	1,4 juta ton	4,6 juta ton	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	620,8
			Jumlah produksi perikanan budidaya air payau.	1.137.920 ton	2.022.220 ton			
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut	2.846.475 ton	10.288.175 ton			
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar.	1.000 unit	7.000 unit			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
25	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi induk unggul.	6,5 juta ekor induk 267.280 ton	52,2 juta ekor ^{K)} induk 2,7 juta ton ^{K)}	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	534,3
			Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar	51 unit	404 unit ^{K)}			
26	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.	Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis.	Lab. Kualitas air : 25 unit	Lab. Kualitas air : 48 unit	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	678,3
				Lab. HPI (hama penyakit ikan) : 20 unit	Lab. HPI : 35 unit			
				Lab. Residu : 9 unit	Lab. Residu : 25 unit			
			Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.	350 kab	450 kab			
27	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang <i>bankable</i> .	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi.	157 kelompok	3.388 kelompok	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	466,4
				394 orang	2.364 orang			
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	19 Lab uji; 3 LSSM (lembaga sertifikasi sistem mutu)	43 Lab uji; 15 LSSM			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
28	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.	Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.	1.115.666 Ha, 70 potensi kawasan	1.365.416 Ha, 150 potensi kawasan	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	667,5
29	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya	Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.	100%	100%	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	1.109,5
30	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	4,5 juta ha ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	745,4
			Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis			
31	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	6 kawasan	50 kawasan ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	481,1
			Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	23 kawasan	145 kawasan ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
32	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.	60 ha	5.000 ha ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	404,5
			Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.					
			- BMKT	2 kapal	12 kapal ^{K)}			
			- Garam	50 ribu ton	500 ribu ton ^{K)}			
		- <i>Deep sea water</i>	200 ribu liter	7,2 juta liter ^{K)}				
33	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	205 pulau ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	578,5
			Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	205 pulau ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
34	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Jumlah <i>usaha</i> penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan	280 kapal	2.680 kapal	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	170,1
			Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan	180 kapal	1.712 kapal			
35	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan <i>illegal</i> dan merusak	Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan	4 wilayah	27 wilayah	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	87,0
			Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	7 wilayah perairan	40 wilayah perairan			
36	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas <i>IUU fishing</i>	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas IUU Fishing	3 WPP	5 WPP	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	1.617,3
			Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas IUU Fishing	6 WPP	6 WPP			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
37	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	536,9
			Kapal Pengawas	0	55 ^{K)}			
			Speedboat	15	137 ^{K)}			
			Stasiun Radar Satelit	0	0 ^{K)}			
			Transmitter VMS	0	1 ^{K)}			
			Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu					
			Kantor dan Bangunan Pengawas	5	30 ^{K)}			
			Dermaga	2	27 ^{K)}			
Pos Pengawas	15	70 ^{K)}						
38	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	Meningkatnya pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah Kapal yang diperiksa	4.000	40.164 ^{K)}	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	93,5
39	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan	Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energy terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan	Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	2	10 ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	242,8
				9	45 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
40	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3 1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 15 ^{K)} 5 paket data ^{K)} terkait fenomena alam laut, 25 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	260,7
41	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap	Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan	6 buah	23 buah ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	413,0
42	Pendidikan kelautan dan Perikanan	Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional	Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan serta prioritas nasional	1.400 orang	7000 orang ^{K)}	Program Pengembangan SDM kelautan dan Perikanan	KKP	963,4
43	Pelatihan kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	6.160 masyarakat 1.103 aparatur	15.000 masyarakat 2.200 aparatur	Program Pengembangan SDM kelautan dan Perikanan	KKP	347,6
TOTAL								44.687,7

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1	Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak	meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak	1. APK PAUD	56,70%	72,90%			217.891,1
			2. APS 7-12	97,90%	>99%			
			3. APS 13-15	87,90%	>95%			
			4. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100			
			5. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	90			
			6. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	90			
1.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ¹⁾	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan Reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)	84	90	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	2.194,0
			2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan penanganan antenatal (cakupan K4)	84	95			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak ¹⁾	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	90	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	1.723,0
			2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi	84	90			
			3. Cakupan pelayanan kesehatan balita	78	85			
1.3	Pembinaan Gizi Masyarakat ¹⁾	Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	2.804,2
			2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	65	85			
1.4	Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan ¹⁾	Meningkatnya pembinaan keperawatan dan kebidanan	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman	70	350	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	68,0
1.5	Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan ¹⁾	Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	90	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	1.205,9
1.6	Pengendalian Penyakit Menular Langsung ¹⁾	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	65	95	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	1.237,3

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.7	Penyehatan Lingkungan ¹⁾	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	62	67	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	2.054,5
1.8	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan ¹⁾	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	50	70	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan	895,8
1.9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak ¹⁾	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah poskesdes beroperasi	70.000	78.000	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	3.994,6
1.10	Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ¹⁾	Meningkatnya PSP remaja tentang PKBR	1. Persentase pengetahuan remaja tentang:	50	62	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	205,3
			a. Kesehatan reproduksi remaja					
			b. HIV/AIDS	64	76			
			c. Perencanaan kehidupan berkeluarga	10	30			
2. Jumlah <i>center of excellent</i> PKBR (per provinsi)	1	15 ^{k)}						

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah PIK remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina	9.373	63.977 ^{K)}			
1.11	Pembinaan ketahanan keluarga ¹⁾	Meningkatnya ketrampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia	1. Jumlah kebijakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga 2. Persentase kabupaten/kota yang memperoleh dan mendayagunakan prototipe BKB-Kit	4 20	8 ^{K)} 20	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	222,6
1.12	Pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi di bidang P4GN ⁴⁾	Meningkatnya kegiatan diseminasi informasi P4GN	Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	10%	10%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	92,7
1.13	Pelaksanaan pengembangan rehabilitasi instansi pemerintah ⁴⁾	Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola instansi pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola instansi pemerintah	-	1 fasilitas TR	Program P4GN	BNN	279,0
1.14	Pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat ⁴⁾	Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola komponen masyarakat	Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola komponen masyarakat	20 fasilitas	20 fasilitas	Program P4GN	BNN	69,8
1.15	Penyediaan layanan pendidikan TK ¹⁾	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses TK bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota	APK TK/TKLB	30,60%	36,60%	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	2.322,4

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.16	Penjaminan kepastian layanan	Tercapainya keluasan dan pemerataan	1. APK SD/SDLB	103,76%	105,44%	Program	Kementerian	11.633,4
			2. APM SD/SDLB	84,65%	85,36%			
			3. Persentase peserta didik SD putus sekolah	1,50%	0,70%			
1.17	Penyediaan subsidi pendidikan SD/SDLB berkualitas ¹⁾	Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa SD/SDLB	1. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	27.672.820	28.211.000	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	59.599,1
			2. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.103.210			
1.18	Penjaminan kepastian pendidikan SMP ¹⁾	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota	1. APK SMP/SMPLB	79,98%	88,59%	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	12.684,6
			2. APM SMP/SMPLB	59,46%	61,07%			
			3. Persentase peserta didik SMP putus sekolah	1,80%	1,00%			
1.19	Penyediaan subsidi pendidikan SMP/SMPLB berkualitas ¹⁾	Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa SMP/SMPLB	1. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.660.639	10.870.000	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	31.512,3
			2. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.195.700			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.20	Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan PK dan PLK yang bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	1. Persentase anak cacat tertampung pada TKLB dan SDLB	29,60%	34,40%	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	697,3
			2. Persentase peserta didik SDLB putus sekolah	1,50%	0,70%			
			3. Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SD PLK	1,40%	3,10%			
			4. Persentase anak luar biasa tertampung pada SMPKH/SMPLB	15,70%	18,90%			
			5. Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SMP PLK	2,20%	6,60%			
			6. Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan TK pendidikan layanan khusus (TK PLK)	3,30%	7,30%			
			7. Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menerima beasiswa penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus	99.754	100.154			
1.21	Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	1. APK SMK	30,06%	35,56%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan Nasional	9.242,9

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			2. Jumlah siswa SMK penerima BOMM	3.000.000	3.400.000			
			3. Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	645.298			
1.22	Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	1. APK SMA/SMLB nasional	35,59%	40,88%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan Nasional	6.530,5
			2. Jumlah siswa SMA penerima BOMM	2.700.000	3.100.000			
			3. Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	800.000			
1.23	Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	1. Persentase anak cacat tertampung pada SMAKH/SMLB	7,41	11,00	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan Nasional	579,3
			2. Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada SMA PLK	2,20%	6,90%			
1.24	Penyediaan layanan PAUD nonformal ¹⁾	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD nonformal bermutu dan berkesetaraan gender di kabupaten dan kota	APK PAUD nonformal	11,31%	13,83%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	5.761,3
1.25	Penyediaan layanan pendidikan kesetaraan ¹⁾	Terciptanya perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan bagi orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten/kota untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri terkait dan atau usaha mandiri (wirausaha)	1. APK PAKET A	0,56%	0,57%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	4.147,6
			2. Persentase peserta didik paket A dari putus sekolah SD/MI	1,93%	1,69%			
			3. APK PAKET B	3,75%	3,75%			
			4. Persentase peserta didik paket B dari putus sekolah SMP/MTS	1,93%	1,69%			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			5. APK PAKET C	1,99%	2,22%			
			6. Persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA	1,93%	1,69%			
1.26	Penyelenggaraan kursus dan pelatihan ¹⁾	Terciptanya perluasan dan pemerataan akses kursus dan pendidikan life skill bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten/kota	Persentase anak putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat, dan bekerja	5%	30%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	1.847,1
1.27	Penyediaan layanan pendidikan masyarakat ¹⁾	Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota	Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan <i>parenting education</i>	0,00%	50,00%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	2.182,2
1.28	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah ¹⁾	1. Meningkatnya APM MI	APM MI	10,55%	10,64%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	12.651,7
		2. Meningkatnya APK MI	APK MI	13,44%	13,66%			
1.29	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah ¹⁾	1. Meningkatnya APM MTs	APM MTs	14,54%	14,93%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	
		2. Meningkatnya APK MTs	APK MTs	19,32%	21,41%			
1.30	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu ¹⁾	1. Tersedianya anggaran BOS MI dan MTs	Siswa MI, MTs penerima BOS (Siswa)	6.184.150	6.595.965	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	23.780,8
		2. Tersedianya Beasiswa Miskin MI	Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa)	640.000	640.000			
		3. Tersedianya Beasiswa Miskin MTs	Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa)	540.000	540.000			
		4. Tersedianya Beasiswa Miskin MA	Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)	320.000	320.000			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.31	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah ¹⁾	Meningkatnya APK MA	APK MA	7,35%	8,56%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	6.341,4
1.32	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Politik ³⁾	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan budaya politik	Jumlah materi/modul tentang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula	15 Modul ^{K)} tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementerian Dalam Negeri	98,1
1.33	Pedoman/petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih ³⁾	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia	5	25 ^{K)}	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik	Komisi Pemilihan Umum	247,5
1.34	Bantuan Tunai Bersyarat ¹⁾	Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	816.000	1.170.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	8.985,0
2	Peningkatan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi	meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	-	100%			2.752,6
2.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	-	100%	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	50,1

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2.2	Penanggulangan Krisis Kesehatan ¹⁾	Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat	Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	105	300	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan	651,0
2.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik ³⁾	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik	Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	25%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri	27,8
2.4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah ³⁾	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah	Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	25%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri	18,8

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2.5	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak ²⁾	1. Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan 2. Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)	1. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA 2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	3000	28.200 ^{KO}	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kemenakertrans	212,0
		3. Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan	3. Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak 4. Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak	10%	40%			58,8
			5. Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	120	990 ^{KO}			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2.6	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak ¹⁾	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.	Jumlah anak telantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	159.500	263.000	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial	1.717,1
2.7	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan ⁵⁾	Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas	1. Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan 2. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel	30%	50%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	9,8
2.8	Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak ⁵⁾	Penyelenggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas	1. Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel	62%	82%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Departemen Hukum dan HAM	7,1

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			2. Persentase anak didik masyarakatan yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel					
			3. Persentase anak didik masyarakatan dan klien masyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel					
3	Peningkatan kelembagaan perlindungan anak	1. Meningkatnya penguatan dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak 2. Menguatnya manajemen dan sistem kelembagaan perlindungan anak	Persentase jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang diharmonisasikan	100	100			529,9

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
3.1	Sistem Informasi Manajemen ⁵⁾	Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat, dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak, dan perkara lainnya	1 keg	1 keg	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kejaksaan Agung	151,9
3.2	Kegiatan Kerjasama HAM ⁵⁾	Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional	Jumlah harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM	100%	100%	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	9,0
3.3	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan ⁵⁾	Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor	20%	100%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	75,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.4	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan ⁵⁾	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis	1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis 2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor	20%	100%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	38,5	
3.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1	3 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	27,5	
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak	K/L	1				1
				prov	5				10
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak	K/L	1				1
prov	1	33 ^{K)}							

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak		2	2 ^{KJ}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	19,1
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak kesehatan anak	K/L	1	2			
				prov	4	23 ^{KJ}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data kesehatan anak	K/L	1	1			
				prov	4	19 ^{KJ}			
			3.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak			
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	K/L	-				1			
	prov	2				25 ^{KJ}			
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak partisipasi anak	K/L	-				3 ^{KJ}			
	prov	1				17 ^{KJ}			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan yang layak untuk anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak	1. Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak		2	2 ^{KJ}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	12,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang lingkungan yang layak untuk anak	K/L	1	5 ^{KJ}			
				prov	4	29 ^{KJ}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak	K/L	1	5 ^{KJ}			
				prov	1	12 ^{KJ}			
3.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	1. Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)		2	2 ^{KJ}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	49,0
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang kota layak anak	K/L	1	10			
				prov	10	10			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	K/L	1	2		
				prov	7	25 ^{ko}		
3.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	K/L	1	4 ^{ko}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak	K/L	1	6 ^{ko}		
				prov	5	26 ^{ko}		
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan	K/L	1	1		
				prov	2	13 ^{ko}		
								11,8

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.11	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah perlindungan anak dari masalah sosial	1. Jumlah kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial		2	4 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	20,6
			2. Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial	K/L	2	5			
				prov	5	8			
			3. Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial	K/L	1	1			
prov	2	17 ^{K)}							
3.12	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	1. Jumlah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum		3	7 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	30,5
			2. RUU Peradilan Pidana Anak		1 Naskah Akademik	1 RUU			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	K/L prov	2 8	6 7			
			4. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum	K/L prov	1 3	3 15 ^{K)}			
3.13	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	1. Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	K/L prov	2 1 5	3 8 11 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	17,2
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak yang berkebutuhan khusus	K/L prov	1 5	8 11 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berkebutuhan khusus	K/L prov	- -	5 15 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.14	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan hak sipil anak	1. Jumlah kebijakan hak sipil anak		1	3 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	11,2
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang hak sipil anak	K/L	1	5 ^{K)}			
				prov	10	29 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data hak sipil anak	K/L	1	5 ^{K)}			
prov	3	10 ^{K)}							
3.15	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI) ¹⁾	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota (prov)		33	33	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	KPAI	43,0
			2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (lap)		1	5 ^{K)}			
TOTAL								221.173,5	

Keterangan:

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

¹⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)

²⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi)

³⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik)

⁴⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pertahanan dan Keamanan)

⁵⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur)